

DARUD DA'WAH WAL IRSYAD DI BARRU 1966-1998

Andi Masyithah Rahmah¹, Najamuddin², Bahri³

Pendidikan Sejarah FIS UNM

Andimasyitarahma2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang Kondisi Darud Da'wah Wal Irsyad sebelum Orde Baru, serta Perkembangan dan dampak keberadaan DDI pada masa Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DDI merupakan organisasi masyarakat yang bersikap tidak terlibat atau bekerjasama dalam kegiatan partai politik. Namun yang terlibat hanya tokoh DDI dan Ketua Umum PB DDI. DDI mengalami beberapa perkembangan pada tahun 1971 yakni dengan mendirikan pesantren DDI Ulul Addariyah Kabbalangan di Pinrang, ditahun 1992 mendirikan pondok pesantren DDI Al-Ikhlas di Takkalasi. Dan terjadi penyesuaian kurikulum dengan Sekolah Negeri agar pesantren DDI diakui oleh pemerintah. Dampak keberadaan DDI dimasa orde baru yakni, terjadinya aksi protes para santri DDI kepada ketua umum PB DDI dan masyarakat tidak ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren DDI, dan adanya perkembangan dari segi fasilitas pesantren DDI, adanya renovasi gedung yang didapatkan DDI dan perkembangan pendidikan Agama Islam mendapatkan perhatian dari pemerintah. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan Ilmu Sejarah dengan tahapan: (1) Heuristik, penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang di peroleh di perpustakaan pesantren Darud Da'wah Wal rsyad di Barru, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Perpustakaan Umum Universitas Negeri Makassar, serta buku-buku koleksi pribadi. (2) Kritik, (3) Interpretasi dan (4) Historiografi.

Kata Kunci : DDI, Orde Baru, Politik

Abstract

This study aims to reveal the condition of Darud Da'wah Wal Irsyad before the New Order, as well as the development and impact of the existence of DDI during the New Order era. The results showed that DDI is a community organization that does not engage or cooperate in political party activities. However, only DDI figures and PB DDI were involved. DDI experienced several developments in 1971, namely by establishing the DDI Ulul Addariyah Kabbalangan pesantren in Pinrang, in 1992 establishing the DDI Al-Ikhlas Islamic boarding school in Takkalasi. And there was an adjustment of the curricula with public schools so that the DDI pesantren was recognized by the government. The impact of DDI's existence during the New Order era, namely, the protests of DDI students to the general chairman of PB DDI and the community did not want to send their children to DDI's pesantren, and there were developments in terms of DDI pesantren facilities, building renovations that were obtained by DDI and development of Islamic religious education attention from the government. The research method used is the Historical Science approach with the following stages: (1) Heuristics, this research uses literature review which is processed in the Darud Da'wah Wal rsyad Islamic boarding school library in Barru, Cultural Value Conservation Center (BPNB), Makassar State University Public Library. , as well as books in private collections. (2) Criticism, (3) Interpretation and (4) Historiography.

Keywords: DDI, New Order, Politics

A. Pendahuluan

Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) adalah organisasi masyarakat yang memiliki tiga bidang usaha yang dikenal dengan trilogi DDI, yaitu Pendidikan, dakwah dan usaha sosial (Usman M. I., 2013) umat Islam, DDI memilih posisi tidak melibatkan diri secara Organisasi walaupun dikalangan pimpinan pusat Masyumi beberapa kali mengajak DDI bergabung kedalamnya. Setelah Partai Masyumi pecah dengan sikap berdiri sendiri dari PSII dan Nahdhatul Ulama, maka sejak itu tokoh DDI dalam bidang politik praktis tidak dikelolah DDI, mulai melibatkan diri pada partai politik tertentu yang dipandang cocok baginya (Muiz Kabry, 2006) Untuk menyalurkan aspirasi politik warga DDI menghadapi pemilu pertama, PB DDI melalui Surat Edaran Nomor: 130/C.1/54 tanggal 15 Juli 1954 yang ditandatangani oleh K.H. Abdurrahman Ambo Dalle selaku pendiri dan Ketua Umum PB DDI, menyarankan agar warga DDI memberikan suara kepada partai-partai Islam yang memasang orang-orang DDI sebagai Calon legislatif (A.Said A. R., 2002)

Melihat situasi dalam pemilihan XII di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, akhirnya Ketua Umum PB DDI mengambil inisiatif untuk ikut menjadi peserta dalam pemilu 1955 dengan mendirikan partai atas namanya sendiri. Pembentukan partai itu dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memperbanyak suara umat Islam yang kemudian disalurkan kepada partai politik Islam yang kebetulan menempatkan warga DDI sebagai calon legislatif (Kabry, 2020). Pada 28 sampai dengan 31 Desember 1957 di Pangkajene Organisasi DDI menyelenggarakan musyawarah yang menyatakan: menuntut dengan mutlak, Islam menjadi Dasar Negara Republik Indonesia". (Astuti, A., & Amirullah, A. 2019). Pernyataan itu timbul setelah melihat dan mempelajari sikap semua organisasi Islam yang memang mengambil alternatif semacam itu dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman

tanggal 15 Mei 1956, nomor J.A.5/33/11 maka organisasi DDI mendapatkan statusnya sebagai organisasi yang dijamin oleh hukum atas hak hidupnya di Negara Republik Indonesia (Ch, 2009). DDI Wal Irsyad lembaga pendidikan yang menyeimbangkan antara kurikulum pendidikan Agama Islam dan pengetahuan umum dalam kurikulumnya (Bahri *et al.*, 2020).

Pada tahun 1966 yang merupakan awal rezim orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Di bawah orde baru partai politik hanya dijadikan legimitasi penguasa saat itu untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia taat dalam menjalankan asas demokrasi, dimana partai politik merupakan pilar atau penanda bahwa demokrasi itu ada di negara tersebut. Partai politik tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa, partai politik tidak memainkan perannya sebagai kontrol bagi penguasa, partai politik tidak bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan (prasetya, 2011)

Pada masa orde baru menghadirkan perjuangan yang cukup menguras energi maupun baik para politisi yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Proses dalam mewujudkan stabilitas politik, rezim orde baru tidak hanya berhenti pada tataran penghisapan kekuatan-kekuatan partai ke dalam tubuh pemerintah, akan tetap tindakan penyeragaman asas dengan menggunakan Pancasila menjadi pilihan selanjutnya. Maka gagasan penyeragaman asas partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial keagamaan dilaksanakan. Gagasan penyeragaman asas yang pada mulanya terbatas pada partai-partai politik, kemudian berkembang atau mengena pada organisasi- organisasi sosial-budaya dan keagamaan lainnya. (Legowo, 2013)

Salah satunya adalah organisasi DDI sebagai lembaga pendidikan di Kerajaan Soppeng Riaja memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat kerajaan dengan menanamkan basis keagamaan (Samsir, 2012). DDI dalam pertumbuhannya berbeda dengan kelaziman

organisasi yang ada secara umum, sebab DDI benar-benar tumbuh dari akar rumput manusia yang ada di pedesaan, sehingga pedesaan adalah basis terkuat bagi DDI dan di desa inilah tumbuh berhasil berkembang pelosok Sulawesi Selatan bahkan di luar Sulawesi. Dalam perjalanan DDI mengalami beberapa tantangan baik eksternal maupun internal.

Tantangan itu adalah suatu kemestian dalam sejarah organisasi, yang diharapkan dapat lebih mendewasakan dan sekaligus menguji tujuan awal didirikannya organisasi itu. Salah satu tantangan yang dilalui organisasi DDI adalah pada masa orde baru yakni, DDI dihadapkan dalam persoalan politik sehingga mengakibatkan ketegangan yang cukup hebat dalam organisasi ini. Dimana adanya kebijakan-kebijakan pada masa orde baru yang mempengaruhi organisasi DDI ini yang berpandangan sama dalam urusan keyakinan/aqidah, namun terpecah karena dipengaruhi oleh perkembangan politik.

Belum ada referensi yang menjelaskan tentang persoalan politik yang dialami oleh organisasi DDI pada masa orde baru dan penyelesaian konflik. Penelitian ini penting dilakukan, karena merupakan salah satu upaya untuk mengungkapkan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa orde baru di Kabupaten Barru. Oleh karena itu berdasarkan beberapa permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Darud Da'wah Wal Irsyad di Barru 1966-1998.

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, atau menafsirkan sebuah fenomena. Penelitian sejarah digunakan untuk mengungkapkan peristiwa sejarah secara kronologis (Bahri, 2019) Dalam penelitian sejarah meliputi empat metode penelitian sejarah diantaranya:

a. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dari metode

penelitian sejarah. Dimana pada tahap ini seorang peneliti mencsri dan mengupayakan penemuan atas sumber sejarah yang memiliki keterkaitan atas objek penelitian. Sumber sejarah tersebut dapat berupa catatan, tradisi lisan, dan setiap titik atau secercah apapun yang memberi penerangan bagi cerita kehidupan manusia. Dalam melakukan pengumpulan sumber, penelitian menepuh dua cara:

1. Penelitian Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian sejarah. Dalam studi pustaka ini akan dilakukan studi terhadap sejumlah bahan pustaka, baik yang berupa arsip, buku, dan hasil penelitian lainnya yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Bahan pustaka tersebut akan penulis di peroleh dari perpustakaan umum Pondok Pesantren DDI Takkalasi dan Perpustakaan umum lainnya, serta buku- buku koleksi pribadi.

2. Penelitian Lapangan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian lapangan adalah mengadakan pengumpulan data secara langsung terhadap objek yang menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini penelitian menggunakan kegiatan observasi dan metode wawancara. Kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut: (1). Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan di teliti atau terhadap lokasi penelitian. Metode observasi yang peneliti maksud adalah mengadakan pengamatan dan penginderan langsung terhadap masyarakat atau objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi pada tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Pondok Pesantren DDI di Barru. (2). wawancara terhadap orang yang dianggap berkompeten dalam objek yang diteliti ini. Wawancara ini dilakukan kepada Pimpinan, wakil Pimpinan dan beberapa guru DDI serta masyarakat DDI. Dalam hal ini dimaksud agar para informan tidak merasa terpaksa memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Hasil

wawancara ini dapat direkam dan dicatat untuk selanjutnya diperbaiki pada saat penyusunan laporan penelitian. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh peneliti bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kritik Sumber

Setelah sumber yang digunakan sudah dianggap cukup, maka langkah kongkrit penulis selanjutnya adalah menilai sumber tersebut untuk menyeleksi dan menguji kebenaran suatu sumber, guna mendapatkan data yang otentik. Dalam kritik sumber, terdapat penekanan tertentu yang bertujuan untuk memberikan defenisi kritik sumber itu sendiri. Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang di gunakan dari sumber tersebut, atau biasa disebut kritik eksternal, sedangkan penyelesaian informasi yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak, dikenal dengan kriik internal (Sejarah, pengantar ilmu sejarah, 2011)

c. Interpretasi

Interpretasi dilakukan sesuai dengan judul pada penelitian yang mengurai tentang Darud Da'wah Wal Irsyad Pada masa orde Baru

d. Historiografi

Pada tahap ini fakta-fakta telah dirumuskan atau diinterpretasikan mengenai DDI dengan mengungkapkan bagaimana DDI pada masa orde baru, perkembangan serta dampaknya. Selanjutnya dirangkaikan dan disusun menjadi satu tulisan utuh mengenai sejarah DDI pada masa orde baru.

B. Tinjauan Pustaka

Gambar umum Darud Da'wah Wal Irsyad

Darud (rumah) artinya tempat atau sentrum penyiaran, Da'wah (ajakan) artinya panggilan memasuki rumah tersebut dan Al Irsyad (petunjuk) artinya petunjuk itu akan di dapatkan melalui proses berdakwah lebih dahulu di suatu daerah kemudian disusul pendidikan pesantren/madrasah. Dimana pada awal perkembangan agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal

(Nirwana, Amirullah and Bahri, 2019). Peran itupula dilakoni oleh Darud Da'wah Wal Irsyad adalah suatu organisasi yang mengambil peran dalam fungsi mengajak manusia ke jalan yang benar dan membimbingnya menurut

ajaran Islam kearah kebaikan dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat.

1. Tujuan organisasI DDI

Setiap organisasi mempunyai misi tersendiri yang dapat dilihat pada tujuan berdirinya organisasi itu. Demikian DDI yang berdiri dengan tujuan tertentu.

- a). memajukan kecerdasan umum dan peradaban kemanusiaan
- b). menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang menyadarkan umat hidup bertakwah
- c). menuntut umat kea rah pelaksanaan ajaran-ajaran Islam guna terwujudnya individu-individu yang berahlakul karima
- d). memelihara persatuan dalam kaum muslimin dan perdamaian dalam masyarakat

DDI dengan sarana pengembangannya berpusat pada tiga sektor penting yaitu

1. Bidang pendidikan

Pendidikan yang diasuh oleh DDI sebenarnya berawal atau bersumber dari pendidikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso, Soppeng Riaja, Barru yang didirikan pada tahun 1939. Kemudian muncul gagasan untuk melakukan pengembangan yang lebih intensif, lebih terorganisir, sehingga pada tahun 1947 dibentuklah suatu organisasi yang akan mengelolanya, yaitu DDI. sejak peralihan MAI menjadi DDI hingga kini DDI telah membina madrasah atau sekolah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (TK), Ibtidayah (SD), Tsanawiyah (SMP), Aliyah (SLTA), Pondok Pesantren dan Penguruan tinggi.

2. Bidang pendidikan

Selain bidang pendidikan DDI juga bergerak di bidang dakwah. Untuk

melakukan dakwah secara terencana kepada umat, maka pengurus Besar DDI membentuk lembaga Dakwah yang bertugas mengkaji materi, metode, sarana, sasaran dan sebagainya yang tepat untuk dilakukan pada situasi tertentu. Dakwah yang dilakukan oleh DDI adalah berdasarkan pada petunjuk Al Qur'an antara lain: a) umat Islam merupakan umat yang terbaik yang hadir di tengah-tengah manusia.. karena itu, umat Islam mengembang misi untuk mengajak manusia kearah yang ma'ruf dan mencegah manusia melakukan perbuatan yang sebenarnya menyalahi tugas dan fungsi kemanusiaannya. b) Dalam melakukan dakwah, dipentingkan sikap: ramah tamah, lemah-lembut, pemaaf dan welas asih. Kesemuanya ini dilakukan atas prinsip-prinsip kebersamaan, kesetaraan, keadilan dan menghargai perbedaan. Sementara sifat angkuh dan sombong, keras hati dan merasa benar sendiri harus di jauhi c) prinsip kebijaksanaan (hikmah), nasehat yang baik dan diskusi yang sehat akan memberikan hasil dakwah yang lebih maksimal, baik untuk kepentingan penyampaian nilai-nilai kebenaran, maupun dalam kaitannya untuk menemukan kebenaran landasan normative Alqur'an menjadi landasan dan acuan Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh DDI, sehingga apapun bentuk dan cara dakwah yang dilakukan, harus mengacu pada sikap diatas.

3. Bidang usaha

Usaha sosial merupakan bidang ketiga dari wilayah garapan yang dikembangkan oleh DDI. Bidang usaha sosial masih belum ditangani secara maksimal (Kabry, 2006)

C. Pembahasan

1. Kondisi Darud Da'wah Wal Irsyad sebelum orde baru

a. Kondisi kehidupan politik Darud Da'wah Wal Irsyad sebelum orde baru

Pada waktu masyumi (Partai Majelis Syuro) didirikan pada tahun 1948 dengan tujuan utamanya

menghimpun kekuatan politik umat Islam, DDI memilih posisi yang tidak melibatkan diri secara organisasi walaupun dikalangan pimpinan pusat masyumi beberapa kali mengajak DDI bergabung dalam partainya (Kabry, 2006) Namun DDI menolak, Penolakan DDI ini lebih disebabkan karena faktor politik semata. Beberapa tahun berselang dari berdirinya Masyumi berdiri pula Liga Muslim Indonesia yang merupakan badan koordinatif organisasi Islam, dengan tidak menitik beratkan kegiatannya pada politik praktis, maka pada waktu itu DDI ikut serta di dalamnya.

Meskipun tidak terlibat dalam politik praktis tertentu, organisasi DDI berhasil menunjukkan keberadaannya dalam panggung nasional. Pada kongres ulama Indonesia yang berlangsung di Medan pada 1953, DDI telah mengutus wakil-wakilnya ke

musyawarah tersebut. Para wakil ulama yang diberikan kepercayaan untuk mewakili DDI itu ialah Gurutta H. Abdul Rahman Bone, Gurutta H.M Ali Yafie, Gurutta H.M Amberi said dan Gurutta H.M Abduh Pabbaja, keempat orang kuat DDI ini tampil dengan sejumlah persoalan yang dialaminya dalam mengelolah organisasi DDI. Di kongres itu Para utusan DDI juga mengusulkan untuk meningkatkan kegiatan dakwah kepada masing-masing peserta kongres (Ch, 2009)

Pada Mukhtar DDI yang ke 10 itu sedikit mengalami ketegangan karena adanya Tindakan sabotase dari oknum-oknum PKI yang melakukan pelemparan batu ditempat berlangsungnya mukhtar yang diadakan disalah satu gedung dalam kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Situasi politik dan keamanan Ketika itu memang kurang kondusif karena sementara mukhtar berlangsung Meletus peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta. Ketua umum PB DDI bersikap sangat tegas. Beliau Ketika itu mengeluarkan stemen yang berbunyi: "Organisasi DDI punya prinsip bahwa Tindakan politik yang tanpa dilandasi rasa iman dan keyakinan agama yang kuat adalah berbahaya bagi

tugas penyiaran agama.

Sikap ketua umum PB DDI yang antikomunis dan menempatkan tindakan politik harus dibimbing dengan keyakinan terhadap agama, maka organisasi DDI meneruskan kritiknya terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi bahaya PKI maka pernyataan muktamarpun tegas, bahwa PKI sudah mengkhianati pemerintah dengan tidak lagi berpatokan pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila yang telah kita akui sebagai Dasar Negara Indonesia itu pada hakektnya suatu jalan pikiran dan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia. Untuk itu DDI mendesak pemerintah RI untuk secepatnya membubarkan PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya.

2. Darud Da'wah Wal Irsyad pada masa orde baru

Pergantian kepemimpinan dari orde lama ke orde baru memberikan dinamika tersendiri pada sistem politik dan proses pengambilan keputusan karna perdebatan keyakinan. Pergantian rezim ini senantiasa di ikuti oleh perubahan kebijakan. Era orde baru diidentik dengan kepemimpinan Soeharto. Lahinya orde baru ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret tahun 1966 (M.Zulham ariifin, 2018) Periode otoriter secara simbolik menggambarkan watak politik rezim orde baru.

Pengaruh penguasa begitu kuat mengintervensi kebebasan masyarakat dalam beraspirasi. Pada pemilu pertama pada masa orde baru tahun 1971, DDI dihadapkan pada persoalan pelik, yaitu tetap konsisten dengan sikap independen atau terlibat dalam politik praktis. Beberapa tokoh DDI bimbang Ketua Umum PB DDI memberikan pandangan tegas, bahwa "DDI tidak boleh diwarnai persoalan politik. Anggota atau warga DDI yang mau terlibat dalam politik itu terserah tetapi jangan membawahi nama DDI". Namun demikian tokoh DDI dan seluruh warganya diaharuskan berpartisipasi dan menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilihnya melalui partai politik Islam sesuai dengan aspirasi politik masing-masing anggotanya. (Waspada, 2010)

Perkembangan selanjutnya melihat realitas sosial politik yang terjadi pasca pemilu kedua 1971 yang memperlihatkan Golkar bisa terancam dominasinya oleh partai politik berbasis Islam, bisa menjadi penyebab presiden Soeharto mengemukakan sarannya agar partai mengelompokkan diri untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa partai kehilangan identitasnya masing-masing atau dibubarkan sama sekali. Pengelompokan ini mencakup tiga kelompok, yaitu Golongan Nasional, Golongan Spiritual dan Golongan Karya. Akhirnya pengelompokan dalam tiga golongan ini baru terjadi pada tahun 1973. Empat partai, yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kemudian lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dengan demikian pemilu 1977 hanya ada tiga organisasi sosial politik yaitu PPP, PDI dan Golkar sebagai peserta pemilu. (Ismail, 2018) Pada tahun 1977 itu pula sejarah perjalanan hidup DDI yang telah melewati waktu selama sekian tahun mengalami keretakan. Pada saat itu DDI Kembali diterpa gejolak politik, sehingga independensi DDI Kembali dipertanyakan baik oleh kalangan warga DDI maupun diluar DDI. Secara konsitusional independensi kelembagaan DDI didasari ART pasal 9 ayat b yang menyatakan: "Ketua umum dan sekertaris jenderal harus orang bebas dari kepengurusan organisasi politik". Karena situasi dan kondisi pada Waktu itu, maka menjelang satu hari berakhirnya masa pencalonan wakil-wakil dari organisasi peserta pemilu, ketua umum PB DDI menandatangani

formulir pencalonan yang disodorkan oleh Golkar kepadanya. (Kabry, 2006)

Pesantren DDI yang biasanya menjelang pemilu penuh dengan gambar ka'bah isyarat dukungan ke PPP diganti dengan gambar beringin, Lambang dukungan ke Golkar. Kondisi tersebut menunjukkan dinamika politik dalam diri Ketua Umum PB DDI. Pada awal persentuhannya dengan dunia politik, beliau aktif di PSII, setelah partai-partai Islam difusikakan menjadi salah satu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Umum PB DDI menjadi salah seorang juru kampanye PPP yang sangat disegani, menjelang pemilu 1977, beliau berpaling dari PPP dan masuk Golkar. Keterlibatan Ketua Umum PB DDI bukan secara organisasi namun secara pribadi namun keterlibatannya berdampak pada DDI karena K.H. Abdurrahman merupakan simbol dari organisasi DDI. (salam, 2020)

Menjelang penandatanganan formulir pencalonan, sebenarnya telah ada pembicaraan sebelumnya antara ketua umum, dengan sekertaris jenderal Drs. Abd Muiz Kabry. Pembicaraan diantara keduanya adalah mengenai ketentuan Pasal 9 Ayat b Sub 2 ART DDI. Ketua Umum PB DDI menyatakan bahwa dirinya telah melakukan istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah, dan kiranya menerima pencalonan dirinya oleh Golkar adalah langkah strategis yang harus dijalani untuk menyelamatkan kepentingan DDI dan umat pada umumnya.

Berdasarkan pernyataan beliau, bahwa keputusan resmi bahwa K.H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai warga negara RI yang kebetulan menjabat Ketua Umum PB DDI menjadi calon anggota legislatif dari Golkar. Karena melihat kondisi pada waktu itu adanya tekanan dari rezim orde baru dari segi pemilu rakyat memilih karena takut dan dipaksa memilih Golkar dan ulama punya basis massa yang cukup banyak dipedesaan, dan Golkar yang merupakan kendaraan rezim orde baru mengincar suara masyarakat desa yang tidak terikat pemerintahan dan suara yang paling didengar waktu itu adalah suara ulama (Juhri,2020)

Kontrol ketat pemerintahan orde baru dengan menggunakan militer, birokrasi dan Golkar juga tidak segan melakukan Tindakan represif untuk untuk menindak segala Gerakan yang bersifat subversive dan berpotensi mengancam kekuasaannya (Dwi Wahyono Hadi, 2018) Berdasarkan keputusan itu, Maka disepakati agar kebijaksanaan ini disampaikan kepada warga DDI diseluruh Indonesia khususnya warga yang ada di Sulawesi Selatan, agar warga DDI memahami maksud bergabungnya Ketua Umum DDI menjadi calon Legislatif yang mewakili Golkar adalah hasil istikharah dan bukan karena paksaan.

Namun Tindakan yang dilakukan oleh Ketua Umum PB DDI menimbulkan pandangan dari kalangan tokoh-tokoh DDI dan warga DDI. Tokoh DDI dan Warga DDI beserta santri-santrinya tidak bisa memahami sikap dari Ke Umum PB DDI tersebut. Bahwa masuknya K.H.Abdurrahman Ambo Dalle selaku Ketua Umum DDI ke partai Golkar otomatis membawa nama DDI, karena beliau merupakan pimpinan berarti orang-orang yang berada di bawah beliau harus mengikuti apa yang dilakukan, kerena sebelumnya kebanyakan dari tokoh-tokoh DDI dan warga DDI berada di partai PPP dan merekapun beranggapan bahwa masuknya Ketua Umum PB DDI ke Golkar untuk menyelamatkan jabatan-jabatan yang dipegangnya karena pada waktu itu semua sistem pemerintahan di identik oleh Golkar. Sehingga itu menimbulkan konflik yang berkepanjangan ditubuh organisasi DDI. Namun sebenarnya hal itu ditempuh itu menyelamatkan DDI (Arif, 2020).

Sehingga hal itu menuntut Ketua Umum PB DDI untuk menyelamatkan umat Islam dan Lembaga yang dipimpinya dengan masuk Golkar, beliau akan merasa lebih bebas berbuat untuk umat. Sedangkan bertahan dalam partai Islam, desas desus yang ditipukan orang untuk DDI dengan cara dikait-kaitkan dengan DI/TII akan menyudutkan Ketua Umum PB DDI dan DDI ke tempat yang tidak menguntungkan, sedangkan korbannya adalah umat. Saat Ketua Umum PB

DDI berkiprah ke politik, beliau menjadi salah satu seorang yang ikut membesarkan Patai Golkar.

Masuknya Ketua Umum PB DDI ke Golkar tidak berarti memasukkan organisasi DDI. sebagaimana yang dikemukakan bahwa organisasi DDI tetap Independen yaitu tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Masuknya Ketua Umum PB DDI memiliki tujuan tidak lain untuk membesarkan organisasi yang dipimpinnya yaitu organisasi DDI. Ketika beliau masuk berkecimpung didunia politik itu beberapa perkembangan-perkembangan organisasi yang didapatkan salah satunya adalah pondok pesantren yang didirikan pada tahun 1979 yaitu pesantren DDI Kabbalangan Pinrang. Itu semua didapat Ketika berkecimpung dipolitik yaitu Golkar. Karena Golkar pada saat itu merupakan kendaraan dari rezim orde baru sehingga DDI pada saat itu agak mudah meraih kebijakan- kebijakan pemerintah orde baru pada saat itu. (Arif, 2020)

Dalam masa kepemimpinan PB DDI periode 1979-1984 asas Pancasila selalu menjadi perdebatan dalam kaitanya dengan asas organisasi DDI. Kepengurusan PB DDI 1979-1984 diselah oleh sebuah pemilu pada tahun 1982 dimana Soeharto Kembali menjadi pilihan tunggal dalam sidang MPR RI. Setelah Kembali menjadi Presiden, Soeharto mendesak kepada semua organisasi baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, maupun, utamanya kepada organisasi keagamaan untuk mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berlaku dalam organisasi mereka. Meskipun Golkar partai yang didukung penuh pemerintah dan militer, meraih kemenangan mutlak, pemerintah masih menganggap Islam politik sebagai ancaman signifikan. Sehingga pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan untuk membatasi kekuatan Islam Politik yakni menetapkan bahwa semua partai politik dan organisasi massa hanya menganut asas tunggal Pancasila. (Humadi, 2010). DDI sebagai bagian dari potensi bangsa dan bagian integral dari bangsa Indonesia, perlu memiliki kepekaan terhadap perkembangan situasi

dan arahan yang diinginkan dalam skenario politik rezim yang berkuasa, sehingga DDI senantiasa matang dalam menetapkan suatu sikap dan kebijakan agar organisasi dapat berkembang terus dalam mengembangkan misi dan amanat umat. Desakan pemerintah terhadap asas tunggal Pancasila bagi setiap organisasi terjadi beberapa tahun sebelum kepengurusan DDI periode 1979-1984 berakhir, dengan pertimbangan secara matang Pengurus DDI lebih melihat pentingnya pembinaan persatuan bangsa sebagai modal utama dalam mensukseskan pembangunan yang sementara digalakkan oleh bangsa Indonesia dan Pengurus DDI pada waktu itu juga mengambil kebijakan untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Kebijakan PB DDI tentang asas Pancasila rupanya banyak diilhami oleh hasil keputusan Mukhtamar DDI ke 14, Mukhtamar ini menetapkan AD/ART dengan mencantumkan dalam mukaddimahnya bahwa, "Pancasila sebagai salah satu sumber inspiratif dalam kehidupan organisasi DDI", Deklarasi Ujunglare juga menegaskan bahwa "DDI tetap konsisten dengan Pancasila". (Kabry, 2006)

Adapun perkembangan lain yang didapatkan oleh DDI yaitu penyesuaian kurikulum pada bidang pendidikan. pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan pemerintah secara yuridis tentang integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, yaitu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri itu mengatur kebijakan- kebijakan sekolah Agama yang melaksanakan kurikulum Departemen Agama lulusan dan ijazahnya diperlakukan sama seperti sekolah-sekolah umum yang sederajat. (Salam W. A., 2019)

Kurikulum yang digunakan oleh Pesantren DDI sebelumnya adalah kurikulum pesantren yang hanya mempelajari tentang kitab-kitab kepesantrenan yang ditulis oleh kiyai dan diterbitkan oleh kiyai dan akan terkendala oleh

birokrasi pemerintah dan tidak bisa masuk pada kegiatan pemerintahan karena terkendala oleh ijazah. Sehingga timbul harapan untuk nasib umat Islam setelah terjadinya era reformasi, pondok pesantren mulai berbenah diri lagi dan mendapatkan tempat lagi dikalangan pergaulan nasional. Hal itu menuntut Ketua Umum PB DDI untuk menyesuaikan kurikulum pada sekolah negeri agar pesantren DDI diakui oleh pemerintah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Ketua Umum PB DDI melihat selain santri-santrinya yang mondok di pesantren DDI tau akan agama dia juga tidak ketinggalan dunia. Sehingga pesantren DDI tidak dipandang sebagai Lembaga pendidikan tradisonal yang illegal, namun pesantren DDI diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Perubahan ini, disatu sisi merupakan perubahan yang mengembirakan. Lulusan pesantren menjadi sederajat dengan lulusan sekolah umum yang setingkat. Namun disisi lain, justru menjadi problema tersendiri. Problemanya adalah berkurangnya muatan materi pendidikan agama. Dimana sebelum adanya perkembangan kurikulum belum mampu mencetak muslim yang sejati apalagi kemudian dikurangi dan pengetahuan agamanya tidak mendalam. (Juhri,2020)

Adanya perkembangan-perkembangan yang didapat oleh DDI semua kesalahpahaman yang terjadi tertepis dan tokoh DDI, Warga DDI beserta Santri bisa memahami sikap yang diambil oleh Ketua Umum PB DDI, kenapa beliau memilih Golkar ternyata hal itu dilakukan untuk kebaikan DDI kedepanya karena ketika itu suka atau tidak Golkar yang berkuasa. Dan DDI tidak akan maju hanya dengan hanya hanya menggunakan swadaya masyarakat. (Latief M. , 2020)

3. Dampak Keberadaan DDI Antara Tahun 1966-1998

a. Dampak Negatif

Keterlibatan Ketua Umum PB DDI yang secara pribadi berdampak pada organisasi DDI karena beliau merupakan simbol dari organisasi. pada waktu itu pengaruh Partai Islam sangat kuat di masyarakat sehingga dikalangan santrinya sikap beliau menimbulkan pro dan kontra. Banyak santri yang tidak bisa memahami dari beliau yang kemudian masuk ke Golkar yang bukan Partai Islam. Santri-santri menginginkan Ketua Umum PB DDI untuk masuk ke Partai Islam sehingga pesantren yang dipimpin langsung oleh beliau di pare- pare santri-santrinya keluar meninggalkan pesantren sebagai bentuk protes terhadap sikap politik dari Ketua Umum PB DDI tersebut. (Rasyid, 2020)

Masyarakat pada masa orde baru tidak mau menyekolahkan anaknya di pesantren DDI karena menganggap bahwa masa depan Pesantren-pesantren DDI kelam (Latief M. , 2020) kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Ketua Umum PB DDI dengan masuk ke Golkar mendapat sorotan dari beberapa ulama. Meskipun dengan maksud menyelamatkan organisasi DDI namun sikapnya dinilai oleh KH. Muh. Abdul Pabbajah yang merupakan pimpinan dan pendiri dari pondok pesantren Al Furqon Pare-pare menilainya sebagai sikap yang oportunistis. KH. Muh Abdul Pabbaja sebelumnya sangat aktif dalam PPP, beliau sering diundang oleh masyarakat untuk memberikan ceramah-ceramah dan gigih memperjuangkan partai persatuan pembangunan (PPP).

Pimpinan pesantren Al Furqon tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh Ketua Umum PB DDI dengan masuknya ke Golkar. Perbedaan pilihan antara Ketua Umum PB DDI dengan Pimpinan Pesantren Al furqon ah hanya dalam bidang politik dan namun hal itu tidak menjadi masalah besar antara kedua pihak antara Ketua Umum PB DDI dan pimpinan pesantren Al

Furqon dalam berpolitik yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan politik. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni menyelamatkan umat Islam dimasa orde baru. sehingga ikut andil dalam berpolitik. Namun dalam memahami akidah dan syari'ah keduanya tetap sama dan secara pribadi keduanya tetap menghargai. (Rasyid, 2020)

b. Dampak Positif

Pendidikan madrasah-madrasah yang dimiliki DDI terus saja mengalami perkembangan dari tingkat Raudal Atfal (RA) sampai pada tingkat Aliyah semua didapatkan setelah terlibatnya Ketua Umum PB DDI pada partai politik yaitu Golkar. Dan Adanya bantuan berupa fasilitas gedung pesantren, renovasi dan pengadaan alat penunjang pendidikan. Sehingga perkembangan ini mendapatkan apresiasi oleh pemerintah atas dedikasinya (Latief A. M., 2020) Pada masa orde baru perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren pada periode orde baru seakan tenggelam eksistensinya karena seiring dengan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada kepentingan umat Islam. Namun dalam hal itu pondok pesantren yang sehaluan dengan pemerinah mendapatkan perhatian. Perhatian pemerintah pada masa orde baru sangat dipengaruhi oleh pilihan politik. Pesantren-Pesantren DDI sangat diperhatikan oleh pemerintah termaksud pemerintah pusat dan sangat mudah mendapatkan akses-akses dari pemerintah. Sehingga dalam hal itu perkembangan pendidikan Agama Islam mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah orde baru. (Rasyid, 2020)

D. Kesimpulan

DDI secara organisasi tidak terlibat dalam politik praktis seperti yang telah dikatakan bahwa organisasi DDI Independen, tidak terikat oleh partai politik manapun akan tetapi anggota yang ada di dalam kelembagaan DDI bergabung dalam kegiatan politik dengan tidak membawa nama DDI

keterlibatan itu bukan secara organisasi tetapi secara pribadi seperti yang dilakukan oleh salah satu pencetus DDI itu sendiri yaitu, K.H.Abdurrahman Ambo Dalle yang bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). DDI memang tidak membuat aturan organisasi mengenai larangan untuk bergabung dengan partai politik sehingga banyak anggota DDI yang bergabung dengan partai politik. Tokoh DDI dan warga DDI sadar akan hak politiknya yang peduli terhadap kepentingan rakyat dan bangsa sehingga memberikan kontribusi yang nyata dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk menyelamatkan organisasi DDI dari ancaman politik.

Sejak berdirinya pemerintah orde baru, terlebih sejak berlakunya kebijaksanaan restrukturisasi politik, bangsa ini mengalami tranformasi kekuasaan dan transformasi alinsi kelompok. Tranformasi itu menyebabkan tumbuhnya suatu birokrasi pemerintahan yang begitu kuat dan stabil. Gejala ini tidaklah semata-mata persoalan administratif, melainkan bersifat politis dan kekuasaan. Pada masa orde baru partai politik mengalami penyederhanaan menjadi tiga partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya (Golkar). Pada saat itu kebanyakan ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam berada yang PPP yang merupakan Gabungan dari Partai-partai Islam yang ada pada saat itu seperti PSII, NU, Masyumi, dll, dan PDI merupakan Gabungan dari partai-partai yang nonIslam sedangkan Golkar merupakan kendaraan yang digunakan oleh rezim orde baru. Ketika itu Sebagian besar tokoh-tokoh Islam termaksud tokoh-tokoh DDI berada dalam PPP sedangkan pemimpin organisasi DDI mengambil sikap dengan masuk ke Golkar, sehingga Pimpinan DDI seakan-akan melawan arus karena mayoritas Tokoh DDI dan warga DDI serta santri-santrinya berada di Partai Islam. Namun adalah pilihan politik yang diambil oleh Ketua Umum PB DDI dalam perkembangannya DDI diutungkan. Pada masa orde lama tidak masalah yang dihadapi DDI

terkait situasi politik pada waktu itu justru pada saat orde baru berkuasa Ketua Umum PB DDI masuk ke partai Golkar justru berdampak pada organisasi DDI. Golkar ingin memonopoli kekuasaan memaksakan semua tokoh-tokoh untuk untuk masuk ke Golkar sehingga tokoh-tokoh yang tidak memilih Golkar dianggap tidak mendukung pemerintah dan pesantrennya tidak mendapatkan perhatian dan mendapatkan hambatan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan.

Perkembangan-perkembangan yang didapatkan begitu besar Ketika beravilasi dengan pemerintahan orde baru Ketika masuknya di partai-partai terutama partai Golkar.

Daftar Pustaka

- Astuti, A., & Amirullah, A. . " Penetrasi Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan di Sinjai, 1999-2003." *PATTINGALLOANG*, 2019: 24-34.
- A.Said, A. R. (2002). *Darud Da'wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle dalam prepektif sejarah, organisasi dan sistem nilai*. Barru.
- A.Said, A. R. (2020, Februari 14). DDI pada masa orde baru. (A. M. Rahmah, Interviewer)
- Arif, M. (2020, Februari 09). DDI Pada Masa Orde Baru. (A. M. Rahmah, Interviewer)
- Arsyad, A. R. (2018). . *Dakwah, pemikiran dan ajaran Anregurutta K.H.Abdurrahman Ambo Dalle*. Barru.
- Bahri, A. D. (2019). Lontarak : Sumber belajar sejarah lokal Sulawesi Selatan. *Pendidikan Sejarah*, 4.
- Bahri, B. *et al.* (2020) 'Sejarah Pondok Pesantren DDI Pattojo di Kabupaten Soppeng (1947-2018)', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*. Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sriwijaya, 9(1), pp. 82-94.
- Ch, N. A. (2009). *Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis*. Yogyakarta: Pustaka Nasional.
- Humadini, Z. (2010). Islam dan Pancasila:Pergulatan Islam dan negara periode asas tunggal. *Kontekstual*, 295.
- Ismail, R. (2018). Peta kekuatan partai Islam dalam empat era pemerintahan Indonesia. *Populis*, 877.
- Juhri. (2020, februari 15). DDI pada masa orde baru. (A. M. Rahmah, Interviewer)
- Kabry, A. M. (2006). *Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Dalam Simpul Kebangkitan dan Perkembangan*. Pare-pare.
- Labalo, M. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan di Indonesia*. Jakarta: Pt RajaGrafindo.
- Latief, M. (2020, Februari 13). DDI pada masa orde baru. (A. M. Rahmah, Interviewer)
- Legowo, S. H. (2013). Dinamika politim rezim orde baru di Indonesia studi tentang kegagalan konsolidasi poitik rezim prde baru pada tahun 1990-1996. *Publika budaya*.
- Najamuddin, M. Z. (2018). politik luar negeri Indonesia masatransisi [pemerintahan orde lama pemerintahan ordebaru tahun 1965-1973. *Jurnal Patitingalloang*, 107
- Nirwana, N., Amirullah, A. and Bahri, B. (2019) 'Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru di Kabupaten Bone, 1970-2018', *PATTINGALLOANG*, 6(3), pp. 66-77.
- Muhammad Saleh Majid, A. R. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- prasetya, i. y. (2011). pergeseran peran

odeologi dalam partai politik. *ilmu budaya dan ilmu pemerintahan*.

- Rasyid, A. (2002). *Darud Da'wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle dalam prepektif sejarah, organisasi dan sistem nilai*. Barru: Ahmad Rasyid A.Said.
- Rasyid, A. (2020, Februari 14). DDI pada masa orde baru. (A. M. Rahmah, Interviewer) Mangkoso.
- Said, A. R. (2013). *Anregurutta Ambo Dalle lentera dari tanah bugis*. Mangkoso.
- Salam, A. (2020, Februari 13). DDI pada masa orde baru. (A. M. Rahmah, Interviewer)
- Salam, W. A. (2019). *Integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional masa orde baru di Indonesia tahun 1967-1989*. Bandung: UIN Sunang Gunung Djati.
- Samsir. (2012). Gerakan Pendidikan dan Sosial Keagamaan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) di Sulawesi Selatan. *Komunikasi dan keagamaan*, 2.
- Usman, M. I. (2013). PE santren sebagai lembaga Pendidikan Islam (sejarah lahir, sistem pendidikan dan perkembangan masa kini). *Al Hikmah*, 101.
- Waspada. (2010). *Ulama perintis : Biografi mini Ulama Sulsel*. Yogyakarta-Makassar: Pustaka Al Zikra.